



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEHUTANAN

Kolonel H. Burlian Punti Kayu Km. 6,5 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telpon (0711) 410739, 411476 Fax. (0711) 411479, Kode Pos 30152
Email : dishutprovsumsel@yahoo.co.id, Website : www.dishutsumsel.go.id

Palembang, 6 April 2026

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

di
Palembang

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 000.7.5/1706 /DISHUT.I/2026

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Triwulan I Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat.

Diterima tanggal :.....
Penerima
Nama Jabatan, :.....

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP:.....

Nomor Telepon:.....

Pengirim
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. H. Koimudin, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP 19691208 199603 1 001

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

1. Tujuan

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu Tahun 2025 - 2029 adalah “Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan ”. Tujuan ini dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan yang berwawasan lingkungan, adil, inklusif dan berorientasi jangka panjang.

2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi yang harus disusun secara konsisten dengan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah: optimalisasi pemanfaatan hasil hutan, peningkatan produktivitas kawasan, mengintegrasikan potensi sumber daya hutan dengan pengembangan ekonomi lokal dan penguatan investasi hijau, sektor kehutanan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi, khususnya bagi Masyarakat yang berada di sekitar hutan.
2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH): memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan secara partisipatif. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi pelatihan, pendampingan teknis, serta penyediaan akses terhadap informasi dan teknologi yang relevan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan KTH.
3. Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan

sosial melalui penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS): mengakselerasi keberhasilan program perhutanan sosial dan pemberian dukungan terhadap KUPS melalui peningkatan akses pembiayaan, pemasaran, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan jejaring usaha yang berorientasi pada nilai tambah hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

4. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan: merupakan komitmen dalam menjaga fungsi ekologi hutan sebagai penyangga kehidupan melalui konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) yang adaptif terhadap perubahan iklim.
5. Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga: perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari tata ruang ekologis yang esensial. Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penanaman vegetasi penyangga, serta penguatan kolaborasi multipihak menjadi bagian dari strategi untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan sempadan sungai.
6. Meningkatnya tata kelola Organisasi Perangkat Daerah: penguatan kapasitas kelembagaan, reformasi birokrasi, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis kinerja. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Belanja Program APBD

a. Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 70.138.272.767,- yang terdiri atas :

Belanja Operasi	: Rp. 69.988.272.767,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 60.282.099.894,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 9.706.172.873,-
 Belanja Modal	 : Rp. 150.000.000,-
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan:	Rp. 150.000.000,-

b. Program dan Anggaran APBD

Belanja tersebut terdiri atas 5 Program sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 64.991.272.767,00
- 2) Program Pengelolaan Hutan sebesar Rp 1.972.000.000,00
- 3) Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebesar Rp 95.000.000,00
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan sebesar Rp 3.040.000.000,00
- 5) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebesar Rp 40.000.000,00

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah dalam Renstra 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Persentase Tutupan Lahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- 2) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
- 3) Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)
- 4) Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
- 5) Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial
- 6) Persentase Kerusakan Hutan Pertahun (deforestasi)
- 7) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
- 8) Indeks Keanekaragaman Hayati
- 9) Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi
- 10) Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai
- 11) Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah
- 12) Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 13) Tingkat Implementasi E-SAKIP Perangkat Daerah

5. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan 14 (Empat Belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palembang :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8) Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Hutan.
 - 1) Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi
 - 2) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
 - 3) Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 4) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
- c) Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 1) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyanggah Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- d) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
 - 1) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- e) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh 14 UPTD KPH berlokasi di :

- a) UPTD KPH Wilayah I Meranti berkedudukan di Sekayu
- b) UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis berkedudukan di Bayung Lencir
- c) UPTD KPH Wilayah III Palembang Banyuasin berkedudukan di Palembang
- d) UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding berkedudukan di Kayu Agung

- e) UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji berkedudukan di Kayu Agung
- f) UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura berkedudukan di Batu Raja
- g) UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka berkedudukan di Muara Dua
- h) UPTD KPH Wilayah VIII Semendo berkedudukan di Muara Enim
- i) UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji berkedudukan di Prabumulih
- j) UPTD KPH Wilayah X Dempo berkedudukan di Pagar Alam
- k) UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah berkedudukan di Lahat
- l) UPTD KPH Wilayah XII Benakat berkedudukan di Talang Ubi
- m) UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong di Lubuk Linggau
- n) UPTD KPH Wilayah XIV Rawas di Muara Rupit.

Kegiatan terdiri dari :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3) Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Hutan.
 - 1) Pelaksanaan Perlindungan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Sekretaris Daerah Nomor : 000.7.2.8/0351/Bappeda-V/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN APBD

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan ini pada OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

- a. **Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik, kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah:**
 - 1) **Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan**

a. Realisasi Total Belanja

Tabel 2.1 Realisasi Total Belanja Triwulan I Tahun Anggaran 2026

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d Triwulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	70.138.272.767,00	13.702.455.066,00	32,67	19,54	32,67	19,54
Belanja Operasi	69.988.272.767,00	13.702.455.066,00	32,67	19,58	32,67	19,58
Belanja Pegawai	60.282.099.894,00	13.566.985.066,00	30,88	22,51	30,88	22,51
Belanja Barang dan Jasa	9.706.172.873,00	135.470.000,00	1,79	1,40	1,79	1,40
Belanja Modal	150.000.000,00	0	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	0	0	0	0	0

b. Realisasi Belanja (Operasi dan Modal)

Tabel 2.2 Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Triwulan I Tahun Anggaran 2026

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)		Status Realisasi
			Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d Triwulan ini	Target s.d Triwulan ini	Realisasi s.d Triwulan ini	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)	(8)
Total Belanja	70.138.272.767,00	13.702.455.066,00	32,67	19,54	32,67	19,54	Rendah
Belanja Operasi	69.988.272.767,00	13.702.455.066,00	32,67	19,58	32,67	19,58	Rendah
Belanja Pegawai	60.282.099.894,00	13.566.985.066,00	30,88	22,51	30,88	22,51	Rendah
Belanja Barang dan Jasa	9.706.172.873,00	135.470.000,00	1,79	1,40	1,79	1,40	Rendah
Belanja Modal	150.000.000,00	0	0	0	0	0	Rendah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	0	0	0	0	0	Rendah

- b. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada :

1) **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029**

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKU) Triwulan I Tahun Anggaran 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Tutupan Lahan	%	18,8	N/A	N/A
2	Nilai SAKIP Dinas Kehutanan	Nilai	80,72	N/A	N/A

2) **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kehutanan pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kehutanan (IKU) Triwulan I Tahun Anggaran 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,27	N/A	N/A
2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,86	N/A	N/A
3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	8	0	0
4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	4	0	0
5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	42,09	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	% (hektare)	0,367 (4003,62 ha)	0,041 (282,36 ha)	11,17
7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	% (hektare)	0,615(3 lokasi)	N/A	N/A
8	Indeks Keanekaragaman Hayati	% (hektare)	3,092 (3 lokasi)	3,092	100
9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi	%	0,14	0,015	11,04
10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	1,69	1,532	90,65
11	Persentase Pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	%	100	26,43	26,43
12	Tingkat Implementasi E-SAKIP Perangkat Daerah	%	100	N/A	N/A

c. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah :

-

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala :-

b. Tindak lanjut yang diperlukan :-

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. H. Koimudin, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19691208 199603 1 001

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEROGAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN MARET (TRIWULAN I) TAHUN ANGGARAN 2026

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber Pendanaan (PAD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	BIDANG SEKRETARIAT	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat; Akuntabilitas Kinerja PD Daerah	Persentase (%)	100	93,07	64.991.272.767,00	13.694.445.066,00	21,07	88,06				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat; Akuntabilitas Kinerja PD Daerah	Persentase (%)	100	93,07	64.991.272.767,00	13.694.445.066,00	21,07	1,70				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	Persentase (%)	100	40	170.000.000,00	0,00	0,00	0				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	80.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	3	90.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	OKI, Kab. Muara Enim, Kab. Prabumulih		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Persentase (%)	100	10	60.662.099.894,00	13.598.325.066,00	22,42	12				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	529	529	60.282.099.894,00	13.566.985.066,00	22,51	24,99	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang dan UPTD KPH Wilayah I-XIV		
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	1	300.000.000,00	31.340.000,00	10,45	10,45	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6	0	80.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Persentase (%)	100	0	30.000.000,00	0,00	0,00	0				
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	30.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Persentase (%)	100	0	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	50.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	0	36.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	Persentase (%)	100	0	937.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	60.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	60.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber Pendanaan (PAD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	150.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	75.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	0	12.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	0	580.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Persentase (%)	100	93,07	35.000.000,00	0,00	0,00	0				
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	35.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	Persentase (%)	100	0	2.361.172.873,00	96.120.000,00	4,07	1,78				
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	20.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	546.152.873,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	1.795.020.000,00	96.120.000,00	5,35	5,35	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Persentase (%)	100	0	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	0	470.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	0	90.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
21	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
II	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFATAN HUTAN	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,27;1,86	n/a	270.000.000,00	0,00	0,00	100				
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,86	n/a	1.972.000.000,00	0,00	0,00	9,52				
ix	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan kawasan hutan	Dokumen	1	0	60.000.000,00	0,00	0,00	0				
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	1	0	60.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
x	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen pembinaan izin berusaha dan realisasi PNPB	Dokumen	4	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber Pendanaan (PAD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2	0	100.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2	0	110.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
III	BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi; Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	0,14;1,69	0,015,11,04	710.000.000,00	0,00	0,00	66,67				
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,86	n/a	1.972.000.000,00	9.845.446.245,00	91,37	95,24				
xi	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	0,14	0,015	610.000.000,00	0,00	0,00	66,67				
25	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	Dokumen	1	0	80.000.000,00	0,00	0,00	0				
26	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	12	0	450.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
27	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	14	0	80.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
xii	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	0,14	0,015	60.000.000,00	0,00						
28	Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha nonPerhutanan) kegiatan usaha pengadaan dan pendedaran hasil, pemasaran dan penawaran	Unit Usaha	3	0	60.000.000,00	0,00	0,00	0				
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	1,69	1,532	40.000.000,00	0,00	0,00	0				
xiii	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	0,14	0,015	40.000.000,00	0,00	0,00	0				
29	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	1	0	40.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
IV	BIDANG PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDAE	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutah	Lokasi; Persentase (%)	61;12,19	261;28,84	1.127.000.000,00	0,00	0,00	100				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sumber Pendanaan (PAD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,86	n/a	1.972.000.000,00	9.845.446.245,00	91,37	95,24				
xiv	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	%	0,367 (4003,62 ha)	0,041 (282,36 ha)	1.032.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
30	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	200	0	132.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	15	0	900.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
III	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	% (ha)	3,092 (3 lokasi)	3,092	95.000.000,00	0,00	0,00	0				
xv	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Rasio			95.000.000,00	0,00	0,00	0				
32	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	60	0	95.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Kemiskinan	
V	BIDANG PENYULUHAN DAN PERMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) ; Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial; Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi);Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah;Indeks Keanekaragaman Hayati ;Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi ;Persentase Tutupan Lahan pada ;	%,	8;4;42,09;0,367;0,615; 3,092;0,14;1,69	0;0;0;0,041;n/a;3,092;0,015;1,532	3.040.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	8;4	0	3.040.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
xvi	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi	%	8	0	3.040.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
33	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	20	0	100.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (PAD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	14	0	280.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Kemiskinan	
35	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	5000	0	2.660.000.000,00	0,00	0,00	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Kemiskinan	
Jumlah : 5 Program, 16 Kegiatan, 35 Sub Kegiatan						70.138.272.767,00	13.694.445.066,00	19,52	21,66				

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. H. Koirudin, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19691208 199603 1 001

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKU) Triwulan I Tahun Anggaran 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Tutupan Lahan	%	18,8	N/A	N/A
2	Nilai SAKIP Dinas Kehutanan	Nilai	80,72	N/A	N/A

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. H. Koinudin, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19691208 199603 1 001

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kehutanan (IKU)
Triwulan I Tahun Anggaran 2026**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,27	N/A	N/A
2	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,86	N/A	N/A
3	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	%	8	0	0
4	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	4	0	0
5	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan	%	42,09	0	0
6	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	% (hektare)	0,367 (4003,62 ha)	0,041 (282,36 ha)	11,17
7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	% (hektare)	0,615(3 lokasi)	N/A	N/A
8	Indeks Keanekaragaman Hayati	% (hektare)	3,092 (3 lokasi)	3,092	100
9	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi	%	0,14	0,015	11,04
10	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	1,69	1,532	90,65
11	Persentase Pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	%	100	26,43	26,43
12	Tingkat Implementasi E-SAKIP Perangkat Daerah	%	100	N/A	N/A

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan



 Drs. H. Koimudin, S.H., M.M.
 Pembina Utama Madya/IV.d
 NIP. 19691208 199603 1 001